

NASAKOM SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA TAHUN 1959-1965**LINGGA WINATA**

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email: lingga1208.lw@gmail.com

Sri Mastuti Purwaningsih

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Dinamika mengenai sebuah ideologi sering terjadi di Indonesia. Ideologi-ideologi itu muncul sejak zaman pergerakan dan bahkan terus berkembang pasca Indonesia merdeka. Penelitian mengenai dinamika yang terjadi antar ideologi sangat menarik karena akan menunjukkan betapa sengitnya rivalitas yang terjadi. Rivalitas yang biasanya sering terjadi yaitu antara aliran Nasionalis, Islamis dan Marxis seperti yang telah dijelaskan oleh Soekarno dalam artikelnya yang berjudul Nasionalis, Islamis, dan Marxis. Namun akhirnya Pancasila muncul sebagai ideologi terbuka yang menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Penelitian mengenai Pancasila sering dilakukan dan tentunya menghasilkan pemahaman yang berbeda-beda. Perkembangan Pancasila juga menimbulkan dinamika yang menarik. Penelitian kali ini tidak terfokus pada kajian Pancasila melainkan pada konsep yang menyainginya pada masa demokrasi terpimpin yaitu Nasakom. Berawal dari latar belakang ini maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang Nasakom yang diterapkan pada demokrasi terpimpin. Maka ditentukan dua rumusan masalah antara lain (1) Bagaimana latar belakang munculnya Nasakom? (2) Bagaimana fungsi Nasakom pada tahun 1959-1965?. Teori yang digunakan sebagai unit analisa adalah terori ideologi negara yang disampaikan oleh Paul Riceour. Berdasarkan teori ini, ideologi memiliki 3 fungsi yaitu, fungsi distorsi, fungsi legitimasi dan fungsi integrasi.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Nasakom merupakan ideologi dan memiliki 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah Nasakom digunakan sebagai ideologi yang mengimbangi kekuatan politik yang ada dan menjaga posisi Sukarno agar tidak terjadi kudeta. Fungsi lainnya adalah sebagai ideologi yang mampu menjaga integritas bangsa dan menjaga persatuan bangsa. Diantara kedua fungsi ini terdapat tujuan yang tidak selaras, sehingga untuk menyelaraskannya perlu adanya fungsi legitimasi. Nasakom dilegitimasi agar kekuasaan Sukarno terimplementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila fungsi legitimasi berjalan dengan baik maka dua fungsi utama Nasakom juga akan berjalan dengan baik. Akan tetapi nasakom mengalami kegagalan karena fungsi legitimasi tidak berjalan dengan baik. Nasakom menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat, ditambah dengan peristiwa G30S yang diduga didalangi oleh golongan komunis yang menjadi tanda bahwa Nasakom mencapai puncak keagalannya.

Kata Kunci: Nasakom, Ideologi negara, Demokrasi terpimpin

Abstract

The dynamics of ideology are common in Indonesia. The ideologies that emerged during the colonial period and continue to grow until the independence of Indonesia. Research on the dynamics that occur between ideologies is very interesting, because it will show how fierce the rivalry is. The usual rivalry is between the Nationalist, Islamist and Marxist movements, as explained by Soekarno in his article entitled Nationalists, Islamists, and Marxists. Finally, which is used as an ideology in the nation and state in Indonesia is Pancasila. Research on Pancasila is often done and certainly produces different understandings. The development of Pancasila also creates an interesting dynamics. This research is not focused on the study of Pancasila but on the concept that competed in demokrasi terpimpin of Nasakom. Based on this background, the writer would like to know more about Nasakom applied to demokrasi terpimpin. Two problem formulations have been determined among others (1) What is the background of Nasakom? (2) How did the Nasakom function in 1959-1965?. The theory used as an analytical unit is the state ideological theories conveyed by Paul Riceour. Based on this theory, ideology has 3 functions namely, distortion function, legitimacy function and integration function.

The results of this study explain that Nasakom is an ideology and has 3 functions. The first function is Nasakom is used as an ideology that offsets the political power and keeping Sukarno's position in order to avoid a coup d'etat. Another function is as an ideology of the nation's integrity guard. Between these two functions there are objectives that are not aligned, so to harmonize the need for a function of legitimacy. Nasakom was

legitimized for Sukarno's power to be implemented in the life of the nation and state. If the legitimacy function goes well, then the two main functions of Nasakom will also run well. However, nasakom fails because the legitimacy function does not work well. Nasakom cause pros and cons among the people, coupled with the G30S events as a marker of Nasakom's failure as ideology.

Keywords: Nasakom, State ideology, Demokrasi terpimpin

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika mengenai sebuah ideologi sering terjadi di Indonesia. Ideologi-ideologi itu muncul sejak zaman pergerakan dan bahkan terus berkembang pasca Indonesia merdeka. Sosialisme, Marxisme, Komunisme, Nasionalisme, Islamisme, Marhaenisme dan Pancasila merupakan beberapa ideologi yang berkembang. Penelitian mengenai dinamika yang terjadi antar ideologi sangat menarik karena akan menunjukkan betapa sengitnya rivalitas yang terjadi. Rivalitas yang biasanya sering terjadi yaitu antara aliran Nasionalis, Islamis dan Marxis seperti yang telah dijelaskan oleh Soekarno dalam artikelnya yang berjudul Nasionalis, Islamis, dan Marxis. Namun akhirnya Pancasila muncul sebagai ideologi terbuka yang menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia.¹ Penelitian mengenai Pancasila sering dilakukan dan tentunya menghasilkan pemahaman yang berbeda-beda. Perkembangan Pancasila juga menimbulkan dinamika yang menarik. Pancasila pernah tersaingi oleh konsep Nasakom yang dikeluarkan oleh Soekarno pada masa demokrasi terpimpin dan Pancasila juga pernah digunakan sebagai alat legitimasi pemerintahan Soeharto. Penelitian kali ini tidak terfokus pada kajian Pancasila melainkan pada konsep yang menyainginya pada masa demokrasi terpimpin yaitu Nasakom.

Pada demokrasi terpimpin Soekarno menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dan semuanya terpusat kepadanya.² Soekarno menganggap Revolusi Indonesia ditemukan kembali pada masa ini. Sebuah konsep yaitu Nasakom muncul sebagai jargon politik Soekarno saat itu. Nasakom muncul setelah Indonesia diombang-ambingkan oleh beberapa masalah dan membuat Indonesia melenceng dari apa yang telah dicita-citakan yaitu menciptakan masyarakat sejahtera adil dan makmur. Sebelum Nasakom muncul Indonesia mengalami ketidak stabilan politik dan juga banyak mendapat ancaman akan kehancuran integritas bangsa. Agresi militer satu dan dua serta beberapa pemberontakan yang terjadi merupakan

contoh kejadian yang mengancam integritas bangsa.³ Penulis lebih lanjut akan mendalami tentang Nasakom. Penulis menganggap bahwa Nasakom merupakan sebuah ideologi negara Indonesia saat itu. Nasakom yang hadir saat setelah Indonesia mengalami perang mempertahankan kemerdekaan dan setelah terjadi ketidakstabilan politik membuat penulis semakin tertarik untuk menelitinya. Pada masa demokrasi terpimpin memang sudah ada ideologi Pancasila akan tetapi yang lebih ditonjolkan pada masa ini justru Nasakom bukan Pancasila. Penulis mengungkapkan hipotesa bahwa Pancasila adalah tolok ukur jika Indonesia sudah mencapai cita-citanya sedangkan Nasakom adalah sebuah ideologi yang harus diterapkan bangsa untuk mencapai tolok ukur tersebut. Penulis juga menganggap bahwa ada fungsi lain dari Nasakom selain hanya sebagai jargon politik saja, fungsi lain itu adalah sebagai ideologi negara. Sehingga penulis memutuskan untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai Nasakom.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah (1) Bagaimana latar belakang munculnya Nasakom? (2) Bagaimana fungsi Nasakom pada tahun 1959-1965?

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian mengenai fungsi dari Nasakom mampu menambah wawasan mengenai Nasakom yang bukan hanya sekedar konsep melainkan sebuah ideologi yang berusaha diterapkan namun mengalami kegagalan. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi baru bagi masyarakat yang tertarik dengan ideologi-ideologi kiri yang berkembang di Indonesia, sehingga nantinya mampu menunjukkan bahwa ideologi kiri bukanlah ideologi yang menakutkan bagi bangsa dan bukanlah ideologi yang menghancurkan bangsa. Ideologi kiri tidaklah berbahaya bagi bangsa Indonesia, oknum yang menyelewengkan ideologi itu yang menjadikannya berbahaya.

¹ Daniel Dhakidae, dkk. *Soekarno membongkar sisi-sisi hidup putra sang fajar*, Kompas Jakarta, 2013, Hlm 34.

² Alfian, *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, Hlm 39

³ Nurani Soyomukti, *Soekarno dan Nasakom*, Garasi, Yogyakarta, 2008, Hlm 131

Pada dunia pendidikan penelitian ini juga berguna sebagai bahan ajar dalam menyampaikan materi. Seperti pada pelajaran Sejarah di jenjang SMA mengenai kebangkitan nasional, melalui penelitian ini peserta didik dapat dikenalkan mengenai pergerakan bangsa menuju kemerdekaan yang dilatar belakangi oleh bermacam-macam ideologi yang bersatu untuk mencapai kemerdekaan. Penelitian ini mampu mengajarkan kepada peserta didik bahwa perbedaan ideologi adalah hal yang wajar, dan persatuanlah yang mampu membawa Indonesia kearah yang lebih baik lagi. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dalam mata kuliah pendidikan Pancasila di bangku perkuliahan, dengan menjadikan penelitian ini sebagai referensi maka akan didapat pengetahuan mengenai makna lain yang terkandung di dalam Pancasila yang tentunya berkaitan dengan nasakom. Sehingga melalui beberapa manfaat yang dijelaskan besar harapan penulis jika penelitian ini diterbitkan menjadi sebuah buku yang dapat dikonsumsi oleh publik.

METODE

Sebelum judul pada penelitian ini terbentuk pertama kali yang dilakukan penulis adalah menentukan topik pembahasan. Tahap selanjutnya setelah topik dan judul telah ditentukan adalah penelusuran sumber. Penulis menelusuri sumber berupa penelitian yang terkait dengan judul sehingga nantinya akan terhindar dari plagiarisme. Selain penelitian terkait penulis juga mencari tulisan yang dapat dijadikan sebagai sumber primer. Salah satunya adalah tulisan Soekarno berjudul Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme yang dimuat dalam Suluh Indonesia Muda cetakan tahun 1926. Berita yang termuat pada koran mengenai penerapan Nasakom pada masanya juga menjadi sumber Primer. Artikel yang dijadikan sumber primer termuat di beberapa koran, seperti koran harian rakyat, mimbar umum dan harian penerangan yang terbit sejaman dengan demokrasi terpimpin. Pidato-pidato yang telah dituliskan menjadi sebuah buku nantinya juga dapat digunakan sebagai sumber untuk menyempurnakan penelitian ini. Ada pula beberapa buku yang dijadikan sebagai sumber sekunder sebagai penunjang penelitian ini, seperti buku Nasakom dan Sukarno, buku Sosialisme Indonesia dan beberapa sumber lain yang akan dicantumkan di dalam Daftar Pustaka.

Setelah beberapa sumber terkumpul, baik sumber primer maupun sekunder maka tahapan selanjutnya adalah memfilter sumber-sumber tersebut secara kritis, terutama terhadap sumber-sumber primer, agar terjaring fakta yang menjadi pilihannya. Langkah-langkah inilah yang disebut verifikasi sumber, baik terhadap bahan materi (ekstern) sumber maupun terhadap substansi (intern) sumber. Tujuan dari kritik sumber yakni untuk membuktikan bahwa sumber tersebut benar-benar orsinil/sahih atau tidak. Untuk penelitian ini yang dilakukan hanyalah kritik

intern karena sumber yang didapat berupa tulisan dan yang hendak dicari hanyalah substansi yang terkandung didalamnya. Selain memperoleh sumber yang orsinil adanya verifikasi sumber yakni mendapatkan fakta-fakta yang memang sesuai dengan topik pembahasan.

Setelah sumber-sumber di peroleh maka penulis memilah setiap sumber yang didapatkan. Dari semua sumber yang ditemukan ada beberapa sumber yang ternyata kurang sesuai dengan topik pembahasan dan ada pula beberapa sumber yang ternyata sulit untuk dibaca karena sudah termakan usia. Melalui proses verifikasi, sumber yang didapat semakin valid dan siap untuk menuju ke proses selanjutnya.

Tahap ketiga adalah melakukan interpretasi terhadap sumber yang sudah di verifikasi sebelumnya. Pada tahap ini penulis melakukan penafsiran dari fakta-fakta yang didapat dari sumber yang telah diverifikasi. Penafsiran yang dilakukan diharuskan seobyektif mungkin dan tentunya dengan mencantumkan sumber yang penulis gunakan. Dari penafsiran ini nantinya akan ditemukan sumber-sumber yang dapat membuktikan bahwa Nasakom memiliki beberapa fungsi sebagai ideologi negara. Penentuan teori yang digunakan juga dilakukan pada tahap ini dan tentunya teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah teori tentang ideologi negara yang diungkapkan oleh Paul Ricoeur dalam "Lectures on Ideology and Utopia". Analisis sumber menggunakan teori tentunya untuk mendapatkan analisis yang komprehensif. Paul Ricoeur mengungkapkan bahwa ideologi negara memiliki beberapa fungsi yaitu ideologi negara sebagai distorsi, sebagai legitimasi dan sebagai integrasi.⁴ Fungsi ideologi negara sebagai distorsi menurut teori ini adalah sebagai alat untuk mempertahankan status quo oleh pemegang kekuasaan tertinggi atau presiden. Sedangkan fungsi ideologi negara sebagai legitimasi adalah sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan yang dipegang dan guna mengisi kesenjangan antara otoritas penguasa dengan kepercayaan masyarakat akan otoritas dari penguasa. Sehingga pada ujungnya ideologi negara menjadi fungsi integrasi, yakni ideologi negara memiliki peran untuk memelihara identitas social dan membangun eksistensi social. Sehingga nantinya akan dicari indikator-indikator dari Nasakom yang kiranya sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Paul Ricoeur.

Setelah melakukan tahap pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi sumber, interpretasi sumber dan mendapatkan sumber-sumber yang sudah benar-benar tersaring, teranalisis, juga obyektif maka disusunlah menjadi sebuah karya tulis berupa skripsi atau disebut historiografi. Skripsi ini tentunya dituliskan berdasar sistematika penulisan yang sesuai

⁴ Slamet Sutrisno, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Andi Offset, Yogyakarta, 2006, Hlm 29

dengan buku panduan skripsi Universitas Negeri Surabaya.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Paul Ricoeur. Paul Ricoeur mengungkapkan dalam disertasinya yang termuat didalam buku Filsafat dan Ideologi Pancasila yang ditulis oleh Slamet Sutrisno tahun 2006, bahwa ideologi mempunyai 3 fungsi yaitu fungsi distorsi, fungsi legitimasi dan fungsi integrasi. Fungsi-fungsi ideologi oleh Paul Ricoeur didapatnya dari telaahnya terhadap karya-karya pemikir besar, seperti fungsi distorsi yang didapatnya dari pemikiran Karl Marx, fungsi legitimasi dari Weber, dan fungsi integrasi dari Geertz.

a. Fungsi distorsi (Marx)

Marx beranggapan bahwa ideologi memunculkan distorsi yang dibuat oleh kelas dominan dalam masyarakat dalam usahanya yang sistematis guna mempertahankan status quo. Ideologi bukan sebuah keyakinan yang digunakan sehingga menentukan hasil dari proses sosial yang terjadi melainkan sebaliknya, seperti filsafat materialisme bahwa bukan kesadaran yang menentukan kehidupan riil melainkan kehidupan riil yang menentukan kesadaran. Proses sosial yang terjadilah yang akhirnya ditujukan untuk mempertahankan ideologi. Marx juga berpendapat bahwa seluruh proses sosial akhirnya akan bersifat ideologis dalam arti bias, yang diakibatkan oleh fungsi yang distorsif tersebut. Pendapat ini bersandar kepada Feuerbach yang menyatakan bahwa manusia akhirnya dibuat kabur akibat adanya kepercayaan agama sebagai refleksi terbalik atas kenyataan.⁵

Ricoeur mengkritik konsep Marx tentang ideologi dan mengungkapkan bahwa tidak benar jika fungsi distorsi yang menentukan eksistensi ideologi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa menurut Marx seluruh kenyataan sosial bersifat bias akibat fungsi distorsi tersebut sehingga konotasi negatif ideologi tidak bisa dielakkan lagi.⁶ Menurut Ricoeur seluruh kenyataan sosial pada akhirnya akan bias sebagai akibat dominasi ideologi secara distorsif adalah keliru. Berdasar pada paradoks Manheim Ricoeur mempersoalkan bahwa jika segala sesuatu pada akhirnya bias maka bagaimana kita akan mempunyai suatu teori ideologi yang dalam dirinya tidak ideologis? Bias artinya bersifat ideologis, dan teori ideologi yang ideologis bukan lagi sebuah teori. Namun Ricoeur tidak menentang teori Marx secara keseluruhan melainkan mengaitkannya dengan fungsi-fungsi lain dari Ideologi, bukan hanya berfungsi distorsi atau sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan penguasa saja.

b. Fungsi Legitimasi (Weber)

Fungsi legitimasi pada ideologi bersandar pada teori Weber mengenai orde sosial. Tiap orde sosial selalu melibatkan dua fenomena pokok yang melekat dalam tatanan sosial tersebut. Pertama, adanya klaim otoritas bagi penguasa dan kedua, adanya kepercayaan mayoritas masyarakat yang disandarkan pada penguasa. Antara kedua fenomena itu tentunya selalu ada ketidakcocokan tertentu, terdapat kesenjangan yang sifatnya laten.⁷ Fungsi ideologi adalah mengisi kesenjangan tersebut, atau dengan kata lain melegitimasi otoritas.

Tesis Ricoeur mengenai fungsi ideologi sebagai legitimasi mencakup tiga pokok. Pertama, ideologi berkaitan dengan kesenjangan diantara kepercayaan masyarakat dan tuntutan akan otoritas penguasa. Kedua, fungsi ideologi adalah mengisi kesenjangan tersebut. Ketiga, tuntutan bahwa ideologi mengisi kesenjangan itu menunjukkan adanya kebutuhan teori baru tentang nilai lebih yang tidak begitu terkait dengan fenomena kerja sebagai suatu kekuatan sebagaimana dikenal Marx. Oleh karena itu, maka tidak ada sistem pemerintahan yang melangsungkan sistemnya hanya berdasarkan kekuatan atau dominasi dari penguasa. Ideologi juga memainkan perannya dalam mengisi kesenjangan yang terjadi.⁸ Fungsi legitimasi ini berarti fungsi yang berada diantara fungsi distorsi yang sifatnya politis, dengan fungsi integrasi yang sifatnya netral.

c. Fungsi Integrasi (Geertz)

Ricoeur dalam hal ini mengikuti Geertz, bahwa proses sosial itu terangkum dalam sebuah sistem kebudayaan penuh makna. Menurut Geertz, manusia adalah binatang yang terjebak dalam jaringan makna yang telah ditununya sendiri. Ideologi disini mempunyai fungsi yang memperlihatkan peranan riilnya dalam membangun eksistensi sosial. Geertz menekankan bahwa semua tindakan manusia terangkum dalam simbol-simbol dan ideologi mengambil peran mediasi simbolik.⁹ Sehingga ideologi mempunyai hakikat integratif yang sanggup memelihara identitas sosial. Hal ini berarti fungsi distorsi dari ideologi tidak akan bisa terjadi tanpa adanya fungsi integrasi. Fungsi distorsi akan terjadi jika fungsi integrasinya membeku.

Paul Ricoeur menegaskan bahwa fungsi distorsi bukanlah fungsi yang menentukan pada ideologi melainkan hanya fungsi ikutan yang sifatnya dangkal. Ideologi memiliki dua fungsi yang memolarisasi yaitu fungsi distorsi dan integrasi, sedangkan fungsi legitimasi adalah mata rantai yang menghubungkan kedua fungsi tersebut.

⁵ *Ibid*, Hlm 30

⁶ *Ibid*, Hlm 31

⁷ *Ibid*, Hlm 32

⁸ *Ibid*, Hlm 36

⁹ *Ibid*, Hlm 35

Berangkat dari penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Paul Ricoeur menganalisis ideologi dari sisi negatif terlebih dahulu (distorsi) menuju sisi positif ideologi (integrasi) dan legitimasi yang mengisi kesenjangan diantara dua fungsi yang memolarisasi tersebut.

NASAKOM UNTUK MEMPERTAHANKAN KEKUASAAN SUKARNO

A. Fungsi distorsi Nasakom

Pengertian ideologi sebagai distorsi seperti yang sudah dijelaskan pada Bab Pendahuluan adalah ideologi dihadirkan untuk mempertahankan kekuasaan yang sudah ada (Status Quo). Ideologi yang lebih ditekankan pada era demokrasi terpimpin bukanlah Pancasila melainkan suatu konsep yang diberi nama Nasakom. Nasakom lebih ditekankan dalam seluruh bidang pemerintahan. Berdasar dari tiga kekuatan yang ada dengan Sukarno sebagai penyeimbang dapat diketahui bahwa ketiga kekuatan ini juga termaktub dalam konsep Nasakom. Nasionalisme, kekuatan politik militer. Agama, kekuatan politik islam. Komunis, kekuatan politik PKI.

Nasakom masuk ke seluruh komponen struktur pemerintahan khususnya pada bidang politik, terbukti dari DPR hasil pemilu yang dibubarkan dan digantikan dengan DPR Gotong Royong. DPR Gotong Royong berisikan ketiga golongan ini: Partai Nasional Indonesia (PNI), Nahdlatul Ulama (NU), Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Militer.¹⁰ Jika berdasarkan teori Ideologi negara sebagai distorsi maka untuk keadaan seperti ini nasakom dijadikan sebagai penyeimbang kekuatan Militer, PKI dan Islam agar tidak melakukan kudeta kepada penguasa yaitu Presiden. Secara otomatis dengan Nasakom sebagai ideologi negara akan mengakibatkan ketiga golongan ini tidak bisa saling menyerang apalagi mengudeta presiden. Ketiga kekuatan terpaksa untuk bekerja sama dan mengikuti konsepsi dari presiden. NU yang sebelumnya menolak masuknya PKI kedalam pemerintahan mengubah sikapnya setelah Nasakom dikeluarkan dengan melakukan kerja sama dengan nasakom sebagai porosnya dan mendukung paham Nasakom di terapkan pada semua bidang pemerintahan. Seperti yang dilakukan oleh NU di Banyuwangi yang seepakat bekerja sama dengan PKI dan PNI didalam kabinet pemerintahan dengan Nasakom sebagai porosnya.¹¹ Tidak hanya pernyataan NU didaerah saja, pihak PBNU juga menyatakan kesepakatannya dengan Nasakom.¹² Pihak PKI pun sangat setuju dengan konsep Nasakom, karena dengan Nasakom maka PKI diterima oleh Pemerintah untuk ikut masuk kedalam tubuh pemerintahan dan

praktis menambah kekuatan PKI. Jika ada yang ingin menyerang PKI maka penyerangan tersebut akan dikatakan sebagai gerakan anti-Nasakom. Presiden Sukarno juga mengutuk gerakan anti-Nasakom seperti yang disampaikan saat pidato di kongres wanita Indonesia tahun 1963.¹³ Sukarno menganggap kaum imperialis semakin gembira jika kita terus mengedepankan sikap anti-nasakom. Pihak militer pun tidak mampu untuk menghantam PKI ataupun presiden karena terbentur oleh Nasakom. Jika militer melakukan serangan terhadap PKI maka kekuatan militer akan jauh berkurang.

PKI tentunya menjadi pihak yang mendapat keuntungan lebih besar dari Nasakom. Perlindungan dan tambahan kekuatan dari presiden semakin besar. Terbukti ketika Sukarno menyampaikan pidatonya pada ulang tahun ke 45 PKI yang mengatakan bahwa hanya Komunis tenaga yang benar-benar anti-imperialisme sehingga yang digunakan adalah Nasakom bukan Nasamarx maupun Nasasos.¹⁴ Melalui pidato ini maka dapat diketahui dukungan luar biasa yang diberikan oleh presiden terhadap PKI. Keadaan ini tentunya semakin memperkuat hubungan timbal balik PKI dan Sukarno. PKI yang semakin mendapat kekuatan dari Sukarno dan Sukarno yang mendapat dukungan massa yang banyak dari PKI mampu menandingi kekuatan yang dimiliki oleh militer. Banyak usaha yang sudah dilakukan oleh militer untuk menandingi kekuatan PKI yang berlindung pada Sukarno. Militer melarang mogok kerja yang dilakukan oleh organisasi yang berada dibawah naungan PKI yaitu Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Angkatan darat salah satu komponen militer juga pernah melakukan pembubaran Kongres Nasional ke-6 PKI pada 1959, akan tetapi dicegah oleh Sukarno.¹⁵ Sementara dari golongan islam hanya mampu mengikuti konsepsi presiden karena dengan diterapkannya Nasakom kekuatan golongan islam juga melemah.

Era demokrasi terpimpin memberikan suasana baru dalam perpolitikan Indonesia. Sistem ini menempatkan Sukarno menjadi pemegang kekuasaan tertinggi sehingga mengakibatkan kekuatan-kekuatan politik lainnya yang ada menggantungkan harapannya pada presiden. Munculnya paham Nasakom juga kian memperkuat kedudukan Sukarno dan menghambat kekuatan lain untuk menandinginya. Nasakom mengisolasi kekuatan-kekuatan politik yang ingin menambah kekuatannya dalam konstalasi politik era demokrasi terpimpin. Hanya PKI yang mendapat keuntungan lebih berkat adanya Nasakom. Maka dengan demokrasi terpimpin dan Nasakom sebagai ideologinya Sukarno mampu mengimbangi tiga kekuatan yang ada: Militer, PKI dan Islam. Ancaman kudeta dari kekuatan-kekuatan yang ada pun mampu

¹⁰ Daniel Dhakidae. Dkk, *Op. Cit*, hal 86

¹¹ Harian Rakjat, 24 April 1963, *Pernyataan bersama PNI, NU, PKI Banyuwangi*, hal 1

¹² Harian Rakjat, 2 Mei 1963, *Pernyataan bersama PNI, NU, PKI: terus berjuang sampai tjita-tjita revolusi terjapai*, hal 1

¹³ Harian Rakjat, *Presiden Sukarno: Subversi Asing Ikut dalam Pengatjauan-pengatjauan Rasialis*, 20 Mei 1963, hal 1

¹⁴ *Subur, subur, suburlah PKI*, Pidato Presiden Sukarno pada rapat raksasa ulang tahun ke-45 PKI, Jakarta, 1965

¹⁵ Daniel Dhakidae. Dkk, *Op. Cit*, hal 87

diminimalisir dengan baik berkat diterapkannya Nasakom kedalam perpolitikan Indonesia.

NASAKOM SEBAGAI LEGITIMASI KEKUASAAN SUKARNO

A. Nasakom sebagai Ideologi Kiri

Ideologi era itu yang lebih ditonjolkan bukanlah Pancasila melainkan Nasakom. Menurut Soekarno sendiri Nasakom merupakan perasan dari Pancasila sehingga jika Nasakom yang lebih diterapkan itu tidak menjadi masalah.¹⁶ Indonesia dengan suasana yang semakin kiri ditambah dengan Nasakom sebagai ideologinya akan membuat Indonesia semakin beraliran kiri. Banyak terjadi pro kontra diantara masyarakat Indonesia tentang Nasakom, ada yang menolaknya dan ada yang menerimanya. Kelompok yang menolak Nasakom tentunya dikarenakan ideologi Komunis yang diikutsertakan. Banyak yang masih menganggap bahwa komunis adalah golongan orang yang tak beragama dan sangat membahayakan bagi integritas bangsa. Isu-isu mengenai agama dan bahaya laten komunis sering digemakan oleh lawan politik PKI terutama militer.¹⁷ Rekam jejak PKI juga menambah ketakutan masyarakat terhadap bahaya laten komunis. Tetapi Soekarno melalui pidatonya menegaskan bahwa:

Kita tidak harus takut kepada Nasakom, kita tidak harus takut kepada apa yang dinamakan momok komunis. Tidak, saudara-saudara. Malahan sekarang ini kita harus mengadakan satu persatuan total yang tetap berporos Nasakom itu.¹⁸

Persatuan total dengan poros Nasakom diterapkan ke semua bidang pemerintahan. Lembaga pemerintahan yang dibentuk semuanya berlandaskan Nasakom yang terbukti dari anggota-anggota yang dipilih yang mewakili tiap golongan Nasionalis, Agama dan Komunis. Kegotong-royongan sebagai kepribadian Indonesia yang harus diterapkan juga harus berporoskan pada Nasakom. Ketakutan akan Komunis harus disingkirkan demi kepentingan Nasional dan penuntasan revolusi nasional. Ajaran-ajaran Soekarno yaitu Manipol-USDEK juga harus berlandaskan pada Nasakom.

B. Pro Kontra Nasakom

Nasakom dalam perkembangannya terus menimbulkan Pro Kontra. Peran PKI semakin menonjol dengan diberlakukannya Nasakom dan semakin membuat pihak yang Kontra meningkat. Lagi-lagi phobia yang berlebihan terhadap ajaran komunis yang menjadi penyebab semakin banyaknya masyarakat yang kontra. Pihak militer pun pernah

melaporkan kepada presiden Soekarno bahwa PKI telah menyebabkan kekacauan di desa-desa dan mengingatkan kepada presiden agar jangan terlampau percaya dengan kelayakan PKI.¹⁹ Namun presiden Soekarno melarang pihak militer untuk mengambil tindakan politis dalam melawan PKI. Perlindungan dari Soekarno dimanfaatkan oleh PKI dan mengingatkan kepada rakyat bahwa anti Nasakom berarti juga anti terhadap Pancasila dan kontra revolusioner, sedangkan PKI adalah yang paling progresif revolusioner.²⁰ Proses legitimasi Nasakom kedalam kehidupan berbangsa dan bernegara terus dilakukan, agar nantinya mampu menghilangkan pertikaian-pertikaian yang terjadi seperti ini.

Nasakom yang muncul dan dipropagandakan pada era demokrasi terpimpin adalah usaha untuk melegitimasi kekuasaan seorang presiden. Jika pada pembahasan sebelumnya dapat diketahui bahwa Nasakom merupakan sebuah ideologi yang digunakan Sukarno untuk mempertahankan kekuasaannya maka pada Bab ini menjabarkan mengenai fungsi Nasakom yang lainnya. Fungsi lain itu adalah sebagai alat legitimasi kekuasaan Sukarno. Konsep yang dikehendaki Ssukarno mengenai Revolusi Indonesia yang belum selesai diharapkan terlegitimasi dengan baik melalui Nasakom. Persatuan yang berjiwa gotong royong serta memupuk kebencian terhadap nekolim adalah suasana yang diinginkan oleh Sukarno agar konsepnya tetap terjaga dan diterapkan oleh segenap bangsa Indonesia. Munculnya paham Komunis yang menjamur di Indonesia saat itu dan ditambah dengan basis massa yang cukup banyak dari PKI sebagai partai berpaham Komunis menjadi hambatan dalam proses legitimasi Nasakom. Komunis yang memiliki rekam jejak tidak cukup bagus dikalangan bangsa Indonesia membuat paham komunis ditolak dan memunculkan komunis phobia. Bangsa Indonesia memolarisasi pada era demokrasi terpimpin, disatu sisi pro terhadap paham komunis, disisi yang lain kontra terhadap paham komunis. Polarisasi ini lah yang menjadi hambatan Sukarno dalam menuntaskan Revolusi Indonesia. Maka upaya yang dilakukannya adalah membawa Indonesia kearah yang kian revolusioner dengan memberlakukan sistem dan suasana yang revolusioner seperti yang telah dibahas diatas. Nasakom juga dimunculkan agar bangsa yang terpolarisasi ini melebur menjadi satu kesatuan yang mampu menuntaskan Revolusi Indonesia.

Polarisasi yang ada dikalangan masyarakat Indonesia ini menjadikan Nasakom sulit diterapkan secara utuh. PKI sebagai golongan yang berpaham komunis tentunya sangat sepakat dengan Nasakom. Surat kabar harian rakyat yang disponsori oleh PKI selalu mengabarkan pentingnya nasakom sebagai pelancar revolusi.²¹ Tak hanya itu, harian rakyat

¹⁶ Budi Setiyono dkk, *Revolusi Belum selesai*, Jakarta, 2014, hal 214

¹⁷ Rex Motimer, *Indonesian Communism Under Sukarno*, Yogyakarta, 2011, hal 87

¹⁸ Amanat Presiden Sukarno pada Kongres Gerwani ke-IV, *Persatuan Total dengan Poros Nasakom*, 14 Desember 1961

¹⁹ Marwati Djoened Puspongoro, *Sejarah Nasional VI*, Jakarta, 2009, hal 427

²⁰ *Ibid*

²¹ Harian Rakyat, 29 April 1963, *Anti-nasakom harus di*

selalu memberitakan mengenai tuntutan-tuntutan agar Nasakom diterapkan pada seluruh bidang.²² Usaha-usaha yang dilakukan oleh PKI ini agar Nasakom diterima dan mampu menghilangkan Nasakom phobi ataupun komunis phobi.

Sukarno pun berusaha agar Nasakom terlegitimasi secara maksimal dan menghilangkan golongan yang anti-Nasakom. Melalui seorang seniman yakni Subronto K. Atmodjo, terciptalah sebuah lagu yang berjudul Nasakom bersatu.²³ Pada peringatan hari sumpah pemuda yang diadakan di lapangan Ikada, lagu nasakom bersatu pertama kali diperdengarkan dan diikuti dengan bernyanyi bersama oleh semua orang yang hadir.²⁴ Melalui lirik dari lagu itu tercermin bahwa persatuan dengan poros Nasakom harus tercipta dan menghilangkan sikap yang anti-Nasakom. Sukarno sendiri juga mempropagandakan nasakom melalui pidatonya, yang mengatakan bahwa masih banyak yang memiliki sikap anti-Nasakom dan hal ini perlu dihilangkan.

Maka itu saya berkata, lha kok, lha kok sampai sekarang ini ada, masih ada orang-orang, bahkan pemimpin-pemimpin Indonesia yang anti-Nasakom atau pura-pura pro Nasakom, tetapi sebenarnya anti-Nasakom,.....orang yang demikian ini dinamakan Nasakom gadungan.²⁵

Pro kontra ini nyatanya masih terus tumbuh dan sulit dihilangkan sehingga menyebabkan proses legitimasi Nasakom terhambat dan berimbas pada proses legitimasi kekuasaan Sukarno yang juga ikut terhambat. Kegagalan Nasakom dan proses legitimasi kekuasaan Sukarno ini mengalami klimaksnya ketika meletus peristiwa G30S yang menjadi catatan kelam dalam perjalanan Republik Indonesia dengan banyaknya korban jiwa yang berlatar belakang komunis. G30S menandai berakhirnya era demokrasi terpimpin yang bernuansa revolusioner. Sukarno pun turun jabatan setelah mengeluarkan super semar dan ditetapkan menjadi tahanan politik dan jabatan presiden digantikan oleh jenderal Soeharto dari golongan militer.

NASAKOM UNTUK MENCAPAI INTEGRITAS BANGSA

A. Nasakom dan kembalinya Revolusi Indonesia

Demokrasi terpimpin telah dianggap sebagai era dimana Indonesia kembali kepada jalur revolusinya. Setelah sebelumnya Indonesia dikacaukan dengan serangkaian masalah seperti yang telah dijelaskan pada Bab II. Sebelum demokrasi

terpimpin atau pada era demokrasi liberal Indonesia berada di jurang kehancuran. Persatuan Indonesia tidak tercermin pada era ini, banyak terjadi pemberontakan, banyak partai yang lebih mementingkan golongan daripada kepentingan nasional. Bahkan ada intervensi asing dalam pemberontakan yang terjadi, Irian Barat yang masih dikuasai Belanda pun menjadi masalah yang tak terselesaikan. Maka melalui dekrit presiden 5 Juli 1959 kembalilah Indonesia ke jalan revolusinya, dan mulailah era demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin membuat pemerintahan terpusat ke tangan presiden dan dengan kekuasaan yang besar presiden membawa Indonesia ke arah yang revolusioner dengan meningkatkan persatuan guna menyingkirkan nekolim dan menciptakan masyarakat adil dan makmur.

Ideologi yang digunakan sebagai dasar dari persatuan ini bukanlah Pancasila melainkan ideologi lain yang menurut Sukarno adalah perasan dari Pancasila sehingga tidaklah salah jika Nasakom yang diterapkan. Pancasila merupakan lima sila yang jika diperas lagi akan menjadi tiga sila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, Sosio Nasionalisme, Sosio Demokrasi. Tiga sila perasan Pancasila ini termaktub didalam Nasakom, Ketuhanan yang Maha Esa didalam Agama, Sosio Nasionalisme didalam Nas dan Sosio Demokrasi didalam Kom. Jika ketiganya diperas lagi maka menyisakan satu sila, yaitu Gotong Royong. Sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa gotong royong diperas menjadi Nasakom dan Nasakom diperas menjadi Pancasila.²⁶

Sukarno juga mengatakan agar jangan ada pertikaian yang terjadi antara ketiga golongan ini, sebab jika ketiga golongan ini bertikai malah membuat Indonesia semakin hancur, baiknya adalah bersatu untuk menyingkirkan nekolim dan menciptakan masyarakat adil dan makmur.

Siapa daripada saudara-saudara yang pernah ikut didalam peperangan gerilja kita? Tidakkah benar diikalau kukatakan pada waktu itu, nggak ada phobi-phobian, saudara-saudara? Nggak ada! Di Surabaya, ja pemuda Nas, ja pemuda daripada Agama, ja pemuda daripada Komunis berdjombang bersama-sama. Di Bandung demikian pula, dipadang-padang gerilja demikian pula. Hanja belakangan ini, karena ja mungkin, hasutan-hasutan nekolim, tjekokan nekolim, membuat kita itu pura-pura pro Nasakom, tetapi sebenarnja anti Nasakom, sebab memang Nasakom adalah kekuatan daripada revolusi Indonesia, kekuatan yang mutlak. Jang ditakuti oleh nekolim itu Revolusi Indonesia, saudara-saudara, Revolusi Indonesia.²⁷

Persatuan dengan berporos Nasakom lah yang mampu mengembalikan jiwa revolusi Indonesia yang sempat hilang pada era demokrasi liberal.

ganjang, hal 2

²² Harian Rakyat, 13 Mei 1963, *Nasakomkan segala*

bidang, hal 3

²³ Harian Rakyat, 15 Agustus 1965, *Bagaimana menjanjikan lagu "Nasakom Bersatu"*, hal 2

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Pertjalah pada benarnya Nasakom*, amanat-indoktrinasi presiden Sukarno pada pembukaan kursus kilat kader Nasakom, kementerian penerangan RI

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

Revolusi Indonesia inilah yang akan menghancurkan nekolim dan nantinya mampu menciptakan masyarakat adil dan makmur. Nekolim perlu dihancurkan karena nekolim lah yang telah menciptakan ketidakadilan dan menciptakan eksploitasi antara manusia dengan manusia dan negara dengan negara.

B. Nasionalis, Agama, Komunis

Nasionalis, Agama dan Komunis atau yang kemudian disingkat Nasakom merupakan murni hasil pemikiran dari Sukarno. Ketiga ideologi ini berusaha untuk disinkretiskan oleh Sukarno sehingga menjadi satu ideologi yang utuh yaitu Nasakom. Sehingga muncul sedikit perbedaan antara Nasionalisme yang berdiri sendiri, Agama yang berdiri sendiri, dan Komunisme yang berdiri sendiri dengan Nasakom. Nasakom adalah penggabungan ketiga ideologi ini yang juga merupakan perasan dari Pancasila.

Nasakom sendiri sebenarnya sudah diungkapkan oleh Sukarno muda pada tahun 1926, namun dengan nama yang berbeda yakni Nasionalis, Islamis dan Marxis. Seiring berjalannya waktu paham Nasionalis, Islamis dan Marxis terus mengalami perkembangan dan mencapai puncaknya pada era demokrasi terpimpin dengan nama Nasakom. Secara pribadi Sukarno juga mengakui bahwa Nasakom adalah cerminan dari dirinya. Pada bidang politik Sukarno adalah seorang Nasionalis, dalam bidang ideologi Sukarno seorang Marxis, akan tetapi Sukarno juga seseorang yang percaya pada Tuhan.²⁸

Pengkajian lebih lanjut mengenai Nasakom tentunya dilihat dari sudut pandang Sukarno sebagai pencetusnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Nasakom merupakan perasan dari Pancasila dan jika diperas lagi menjadi gotong royong. Pada pidatonya Sukarno mengungkapkan bahwa Pancasila jika dikerucutkan lagi bisa menjadi tiga sila, yakni: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan ke-Tuhanan. Jika di korelasikan dengan Nasakom maka yang dikatakan sosio-nasionalisme adalah Nasionalis pada Nasakom, sedangkan yang dikatakan sosio-demokrasi adalah Komunis pada Nasakom dan yang dikatakan ke-Tuhanan adalah agama pada Nasakom.

Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka bilangan lima itu? Saya boleh peras, sehingga tinggal 3 saja..... Dua dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan perikemanusiaan, saya peras menjadi satu itulah yang dahulu saya namakan sosio-nasionalisme

Dan demokrasi yang bukan demokrasi barat, tapi politiek economische democratie, yaitu politiek democratie dengan sociale rechtvaardigheid: inilah yang dulu saya namakan sosio-demokrasi

Tinggal lagi ke-Tuhanan yang menghormati satu sama lain²⁹

Pengertian dari sosio-Nasionalisme adalah nasionalisme masyarakat yang terletak pada bidang politik dan ekonomi, maksudnya adalah bahwa nasionalisme yang dimiliki harus bermaksud untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi dan keberesan negeri. Sedangkan sosio demokrasi adalah demokrasi masyarakat yang terletak pada bidang politik dan ekonomi juga, maksudnya adalah bahwa demokrasi harus menciptakan kesejahteraan ekonomi dan keberesan negeri juga.³⁰

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa usaha untuk mensinkretiskan ketiga ideologi antara Nasionalisme, Agama dan Komunisme ini terbentur dengan persoalan apakah Komunisme anti Tuhan atau tidak. Perbenturan juga terjadi antara Nasionalisme dengan Komunisme yang terletak pada internasionalisme yang dimiliki komunisme dan kedudukan Komintern dalam internasionalisme itu. Agama yang dimayoritaskan kepada agama Islam juga mengalami benturan dengan Nasionalisme dalam persoalan apakah nasionalisme itu bertentangan atau tidak dengan Pan-Islamisme.³¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan penulis mengambil kesimpulan bahwa Nasakom merupakan sebuah Ideologi yang berusaha diterapkan pada masa demokrasi terpimpin, akan tetapi nasakom mengalami kegagalan. Melalui teori yang digunakan sebagai unit analisa dalam penelitian ini dapat diketahui lebih lanjut bahwa sebuah ideologi dikatakan berhasil jika memiliki tiga fungsi yang berjalan dengan baik. Fungsi yang pertama adalah fungsi distorsi, yang ketiga adalah fungsi legitimasi dan yang terakhir adalah fungsi integrasi. Fungsi distorsi berarti bahwa ideologi digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan seorang penguasa, sedangkan fungsi integrasi berarti bahwa ideologi merupakan alat untuk mempertahankan integritas bangsa dan menjaga eksistensi bangsa. Berdasar dua fungsi ini makafungsi legitimasi menjadi fungsi penghubung antara distorsi dan integrasi. Apabila ketiga fungsi ini berjalan dengan baik maka ideologi itu dapat dikatakan berhasil. Hal ini lah yang tidak dimiliki oleh ideologi Nasakom. Nasakom mengalami kegagalan karena fungsi legitimasinya tidak berjalan dengan baik sehingga fungsi distorsi dan integrasi tidak dapat berjalan searah.

Beberapa fakta yang telah dijabarkan di Bab pembahasan maka dapat diketahui bahwa Nasakom memiliki tiga fungsi. Fungsi pertama adalah sebagai

²⁹ *Ibid*, hal 23

³⁰ Soekarno, *Pokok-pokok ajaran marhaenisme menurut Bung Karno*, 2014, Yogyakarta, hal 53-54

³¹ Roeslan Abdulgani, *Sosialisme Indonesia*, Jakarta, 1965, hal 30

²⁸ Daniel Dhakidae dkk, *Op cit*, Hal 10

penyeimbang kekuatan politik atau sebagai alat Sukarno agar kekuasaannya tetap terjaga. Fungsi kedua adalah sebagai alat legitimasi kekuasaan Sukarno dan yang terakhir adalah sebagai pedoman bangsa dalam mencapai kesejahteraan dan menjaga integritas bangsa. Teori ideologi yang diungkapkan oleh Paul Riceour digunakan sebagai unit analisa dalam melakukan penelitian. Paul Riceour mengungkapkan bahwa ideologi memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi distorsi sebagai alat untuk mempertahankan status quo dan fungsi integrasi sebagai alat untuk menjaga integritas dan tujuan bangsa. Antara kedua fungsi ini memiliki kesenjangan yang cukup lebar maka ada satu fungsi yang mengisi kesenjangan ini yaitu fungsi legitimasi. Fungsi legitimasi mengisi kesenjangan yang ada sehingga mampu menyelaraskan fungsi distorsi dan fungsi integrasi. Jika fungsi legitimasi ini tidak berjalan dengan baik maka fungsi lain dari ideologi akan gagal pula dan dapat dikatakan sebagai ideologi yang gagal diterapkan. Hal ini sama seperti yang terjadi pada Nasakom. Nasakom mengalami kegagalan karena muncul pro kontra dalam penerapannya yang menandakan gagalnya proses legitimasi, ditambah dengan peristiwa G30S yang diduga didalangi oleh PKI dari golongan komunis yang menjadi klimaks gagalnya Nasakom. Gagalnya legitimasi Nasakom yang berimbas pada legitimasi kekuasaan Sukarno menyebabkan Nasakom sebagai ideologi yang gagal karena tidak mampu mencapai integritas bangsa seperti yang diharapkan dari fungsi integrasi yang diharapkan dari sebuah ideologi.

B. Saran

Berdasar temuan-temuan yang didapat dari penelitian ini maka diharapkan nantinya mampu menjadi bahan kajian dalam pembelajaran sejarah. Melalui penelitian ini didapatkan informasi-informasi baru mengenai keberagaman Indonesia. Keberagaman yang dimaksud tentunya mengenai keberagaman ideologi yang bersemayam di Indonesia. Tentunya penelitian ini mampu dijadikan sebagai referensi dalam pembelajaran Sejarah Nasional Indonesia.

Hasil penelitian mengenai fungsi dari Nasakom mampu menambah wawasan mengenai Nasakom yang bukan hanya sekedar konsep melainkan sebuah ideologi yang berusaha diterapkan namun mengalami kegagalan. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi baru bagi masyarakat yang tertarik dengan ideologi-ideologi kiri yang berkembang di Indonesia, sehingga nantinya mampu menunjukkan bahwa ideologi kiri bukanlah ideologi yang menakutkan bagi bangsa dan bukanlah ideologi yang menghancurkan bangsa. Ideologi kiri tidaklah berbahaya bagi bangsa Indonesia, oknum yang menyelewengkan ideologi itu yang menjadikannya berbahaya.

Pada dunia pendidikan penelitian ini juga berguna sebagai bahan ajar dalam menyampaikan materi. Seperti pada pelajaran Sejarah di jenjang

SMA mengenai kebangkitan nasional, melalui penelitian ini peserta didik dapat dikenalkan mengenai pergerakan bangsa menuju kemerdekaan yang dilatar belakangi oleh bermacam-macam ideologi yang bersatu untuk mencapai kemerdekaan. Penelitian ini mampu mengajarkan kepada peserta didik bahwa perbedaan ideologi adalah hal yang wajar, dan persatuanlah yang mampu membawa Indonesia kearah yang lebih baik lagi. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dalam mata kuliah pendidikan Pancasila di bangku perkuliahan, dengan menjadikan penelitian ini sebagai referensi maka akan didapat pengetahuan mengenai makna lain yang terkandung di dalam Pancasila yang tentunya berkaitan dengan nasakom. Sehingga melalui beberapa manfaat yang dijelaskan besar harapan penulis jika penelitian ini diterbitkan menjadi sebuah buku yang dapat dikonsumsi oleh publik.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

- Amanat Presiden Soekarno pada Penutupan Kongres Nasional PKI ke VI, 16 September 1959, Departemen Penerangan Republik Indonesia
- Amanat Presiden Sukarno pada Kongres Gerwani ke-IV, Persatuan Total dengan Poros Nasakom, 14 Desember 1961
- Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945, Hal 3-4 (Kementrian Penerangan)
- Instruksi Menteri Muda Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No 2, tanggal 17 Agustus 1961, dalam lampiran Helius Sjamsudin dkk, hal 202-203
- Lembaran Negara Republik Indonesia No. 77, 1959 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
- Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78, 1959 tentang Dewan Pertimbangan Agung Sementara
- Lembaran negara Republik Indonesia No. 138, 1960, tentang Manifesto Politik Republik Indonesia, Garis-garis Besar Haluan Negara,
- Lembaran Negara Republik Indonesia No. 149, 1959 tentang kepartaian, syarat-syarat
- Lembaran Negara Republik Indonesia No. 152 tahun

- 1960 tentang pola pembangunan nasional semesta berencana, garis-garis besar, tahapan pertama 1961-1969
- Lembaran Negara Republik Indonesia No. 160, 1957 tentang penetapan keadaan bahaya
- Naskah Riwayat Hidup Ir. H. Djuanda Kartawidjaja, (Arsip Kabinet Perdana Menteri)
- Penemuan Kembali Revolusi Kita, Pidato Presiden Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959, Kementerian Penerangan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 tahun 1959 tentang Front Nasional Percaya pada benarnya Nasakom, Pidato Presiden Republik Indonesia pada pembukaan kursus kilat kader Nasakom tanggal 1 Juni 1965, Departemen Penerangan RI
- Sambutan pengurus besar Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia, pada kongres ke-I
- Subur, subur, suburlah PKI, Pidato Presiden Sukarno pada rapat raksasa ulang tahun ke-45 PKI, Jakarta, 1965
- Surat Kabar**
- Harian Penerangan. 8 Agustus 1958.
- Harian Penerangan. 6 September 1958.
- Harian Penerangan. 6 Juli 1960.
- Harian Penerangan. 14 Juli 1960.
- Harian Penerangan. 16 Juli 1960.
- Harian Penerangan. 29 Juli 1960.
- Harian Rakjat. 24 April 1963.
- Harian Rakyat. 29 April 1963.
- Harian Rakjat. 2 Mei 1963.
- Harian Rakyat. 13 Mei 1963.
- Harian Rakjat. 20 Mei 1963.
- Harian Rakyat. 15 Agustus 1965.
- Majalah Pendidikan Nasional. No 5-6, tahun 1962.
- Mimbar Umum. 28 Januari 1958.
- Mimbar Umum. 18 Juni 1958.
- Suluh Indonesia Muda. 1926.
- Buku**
- Abdulgani, Roeslan. 1965. *Sosialisme Indonesia*. Jakarta: Jajasan Prapantja.
- Adams, Cindy. 1965. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Alam, Wawan Tunggul. 2003. *Demi Bangsaaku Pertentangan Soekarno-Hatta*. Jakarta.
- Alfian. 1993. *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Anwar, Rosihan. 2007. *Sukarno, Tentara, PKI Segitiga Kekuasaan sebelum Prahara Politik 1961-1965*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dhakidae, Daniel, dkk. 2013. *Soekarno membongkar sisi-sisi hidup putra sang fajar*. Jakarta: Kompas.
- Feith, Herbert. 1995. *Soekarno-Militer dalam demokrasi terpimpin*. Jakarta.
- Harold, Crouch. 1986. *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Harsono, Ganis. 1985. *Cakrawala Politik Era Sukarno*. Jakarta.
- Kasenda, Peter. 2014. *Sukarno, Marxisme dan Leninisme*. Depok.
- Mortimer, Rex. 2011. *Indonesian Communism Under Sukarno*. Yogyakarta.
- Mun'im, Abdul. 2013. *Benturan NU PKI 1948-1965*. Depok.
- Poesponegoro, Marwati Djoened. 2009. *Sejarah Nasional VI*. Jakarta.
- Ricoeur, Paul. 1986. *Lectures on ideology and utopia*. New York: Columbia University Press.
- Setiyono, Budi, dkk. 2014. *Revolusi Belum selesai*. Jakarta.
- Soekarno. 2014. *Pokok-pokok ajaran marhaenisme menurut Bung Karno*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Soyomukti, Nurani. 2008. *Soekarno dan Nasakom*. Yogyakarta: Garasi.
- Sutrisno, Slamet. 2006. *Filsafat dan Ideologi*

Pancasila. Yogyakarta: Andi Offset

Wehl, David. 1948. *The Birth of Indonesia*. Michigan.

Skripsi

Nur Fitri Hermayati. 2012. *Upaya Nasakomisasi TNI-AD dan Dampaknya pada Situasi Politik Indonesia tahun 1960-1967*. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.

Arfandi A. Cenne. 2016. *Pemikiran Politik Soekarno tentang Nasakom rentang 1959-1966*. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Abi Sholehuddin. 2015. *Jargon Politik Masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965*. Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.

Jurnal

Abdurrahman Wahid, Islam Nasakom dan Kita, tersedia pada <http://santri.or.id/gus-dur-islam-nasakom-dan-kita/2002>

